



2018

RENCANA KERJA



BADAN

PENDAPATAN

DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
SURABAYA 60116

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 050 / 696 / KPTS/ 202 / 2016

T E N T A N G

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
- b. Bahwa sebagai implementasi dan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum penetapan di atas selanjutnya disebut Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang merupakan Rencana 1 (satu) tahun kedepan guna mendukung tercapainya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan tahunan yang menggambarkan Strategi, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018, dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud dalam Diktum kedua berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan dasar penyusunan SAKIP.

Keempat

KEEMPAT : Isi dan uraian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Tanggal : 2 Juni 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang
di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur di seluruh Jawa Timur;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 serta untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Melalui Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini pula diharapkan dapat menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan beserta target sasaran tahun 2018.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Provinsi Daerah Jawa Timur Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Surabaya, Juni 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja	7
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Kinerja Tahun Lalu Serta Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	24
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi	27
2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	28
2.3.3 Formulasi Isu-Isu Penting	31
2.3.4 Strategi dan Kebijakan	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
3.1 Tujuan dan Sasaran	37
3.2 Program dan Kegiatan	39
BAB IV : PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja (Program dan Kegiatan) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun s/d Tahun Anggaran 2016	22
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017	32
Tabel 3.1	Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis	38
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana masing-masing Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah dan mempunyai kedudukan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah peran dokumen perencanaan tahun dalam siklus perencanaan dan penganggaran:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansi merupakan penerjemahan Tujuan, Sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), serta sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.
2. Renja-PD merupakan dasar penganggaran Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja-PD merupakan salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Perangkat Daerah dengan cara mengukur realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD tersebut haruslah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 selain itu sebagai bentuk koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan tahunan maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Selain sinergitas antar dokumen perencanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi perencanaan dengan penganggaran, sehingga dengan perencanaan yang baik diharapkan deviasi antara perencanaan dengan penganggaran tidak terlalu besar.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- c. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta keselarasan program dan kegiatan dengan penganggaran;
- e. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- g. Mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU SERTA DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (tahun lalu) merupakan penjabaran perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah 5 Program dan 57 kegiatan. Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengukur capaian kinerja program/kegiatan serta realisasi belanja tahun 2016 dengan target kinerja dan belanja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 maupun target kumulatif Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2019. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Bidang Keuangan, khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka Indikator kinerja utama yang ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan. Indikator kinerja utama / indikator sasaran tersebut merupakan representasi janji pada visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada dokumen Rencana Strategis 2014 – 2019.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah *milestone* Indikator Kinerja Utama kumulatif dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, titik tolak atau referensi tahun dasar perencanaan yang digunakan adalah pada akhir tahun 2013. Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Tahun kedua (2016) Secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah.

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja (Program dan Kegiatan)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 & Perkiraan Realisasi Tahun 2017

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks kepuasan masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	100%	100%	72.654.143.550	69.021.436.372
019	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah Surat Perpajakan yang Tersedia</i>	<i>28.800.000 set</i>	<i>28.800.000 set</i>	<i>100%</i>	<i>72.654.143.550</i>	<i>69.021.436.372</i>
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	77.629.165.450	73.747.707.177
012	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur</i>	<i>96 lokasi</i>	<i>96 lokasi</i>	<i>96 lokasi</i>	<i>38.236.592.200</i>	<i>36.324.762.590</i>
031	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</i>	<i>96 lokasi</i>	<i>96 lokasi</i>	<i>96 lokasi</i>	<i>39.392.573.250</i>	<i>37.422.944.587</i>
07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	100%	15.010.599.000	14.260.069.050
001	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan</i>	<i>2440 kegiatan</i>	<i>1940 kegiatan</i>	<i>1022 kegiatan</i>	<i>6.816.924.000</i>	<i>6.476.077.800</i>
002	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis</i>	<i>1404 orang</i>	<i>1000 orang</i>	<i>1230 orang</i>	<i>8.193.675.000</i>	<i>7.783.991.250</i>
08	PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	1.815.988.000	1.725.188.600

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) (*)
001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	805.478.000	765.204.100
002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	724.180.000	687.971.000
003	Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir	1 sistem	1 sistem	1 sistem	286.330.000	272.013.500
02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	26,30%	35,21%	28,38%	34.660.003.830	32.927.003.638
		Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) PKB	45%	78,94%	50%		
		Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,00	86,30	86,00		
		Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008	1 ruang lingkup	3 ruang lingkup	1 ruang lingkup		
		Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	30%	53,89%	40%		
019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber Pendapatan daerah	35 dokumen	35 dokumen			
019	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber Pendapatan daerah			35 dokumen	458.585.000	435.655.750
		Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan			70 dokumen		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
210	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	31 kegiatan	31 kegiatan			
210	Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan			70 kegiatan	3.406.055.000	3.235.752.250
212	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Evaluasi Terkait Penerimaan DBH Pajak dan Pendapatan Lainnya	11 kegiatan	11 kegiatan			
212	Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Evaluasi Terkait Penerimaan DBH Pajak dan Pendapatan Lainnya			11 kegiatan	540.980.000	513.931.000
213	Kerjasama dengan Sektor Publik / BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit / Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	Jumlah kerjasama dengan Pihak Perbankan dan Jasa Telekomunikasi	2 kegiatan	2 kegiatan			
213	Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi			2 kegiatan	52.820.000	50.179.000
216	Retribusi Tempat Pelelangan	Jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan	70 kegiatan	70 kegiatan			
219	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen surveillance/ISO	51 dokumen surveillance/ISO	51 dokumen surveillance/ISO			
219	Pelaksanaan Sertifikasi dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah			850 kegiatan	2.782.116.500	2.643.010.675
221	Peningkatan Kinerja Pelayanan	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9 Dokumen	9 Dokumen			
221	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan KB Samsat	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			9 dokumen	14.850.000	14.107.500

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
222	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	139.320.000	132.354.000
223	Pengembangan Pusat Pengolahan Data	Jumlah Hardware Pendukung Peningkatan PAD	10 Unit	10 Unit			
223	Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Software Pendukung Peningkatan PAD			2 lisensi	1.127.500.000	1.071.125.000
224	Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	70 Dokumen	80 Dokumen			
224	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)			70 Dokumen	1.895.777.890	1.800.988.995
249	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen			
249	Pengelolaan dan Monitoring Bagi hasil Pajak Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya			2 Dokumen	282.815.000	268.674.250
257	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi	5 Dokumen	5 Dokumen			
257	Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi			5 Dokumen	852.400.000	809.700.000
258	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten	105 orang	88 orang	105 orang	195.960.000	186.162.000
259	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	Jumlah sarana pendukung pelayanan	12 Sarana	12 Sarana			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) (*)
259	<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah sarana pendukung pelayanan</i>			10 sarana	1.889.570.000	1.795.091.500
265	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	Rp 2.349.218.888.000	Rp 2.420.014.026.719			
265	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			Rp 2.448.727.813.000	619.547.000	588.569.650
266	<i>Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	Rp 549.727.552.000	Rp 598.809.710.280			
266	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			Rp 565.307.159.000	704.376.000	669.157.200
267	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	Rp 2.409.342.408.350	Rp 2.531.591.350.975			
267	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			Rp 2.452.712.060.000	525.648.000	499.365.600
268	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	Rp 538.585.176.650	Rp 590.659.411.726			
268	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			Rp 555.429.721.000	630.361.000	598.842.950
269	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	Rp 787.261.830.000	Rp 852.787.223.562			
269	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Sidoarjo</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			Rp 795.905.126.000	824.125.000	782.918.750

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
270	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Tercapainya target PAD UPT	Rp 271.198.839.000	Rp 298.577.373.617			
270	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 275.977.591.000	675.646.100	641.863.795
271	Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	Tercapainya target PAD UPT	Rp 338.399.500.000	Rp 366.580.790.723			
271	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 344.816.656.000	586.730.000	557.393.500
272	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	Tercapainya target PAD UPT	Rp 199.539.250.000	Rp 218.957.282.210			
272	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 203.923.803.000	638.894.000	606.949.300
273	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Tercapainya target PAD UPT	Rp 166.664.000.000	Rp 182.666.556.233			
273	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 168.536.070.000	664.074.800	630.871.060
274	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	Tercapainya target PAD UPT	Rp 175.463.000.000	Rp 185.126.949.184			
274	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 174.024.332.000	578.394.200	549.474.490
275	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	Tercapainya target PAD UPT	Rp 183.707.625.000	Rp 199.395.165.031			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
275	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 185.901.943.000	630.486.200	598.961.890
276	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	Tercapainya target PAD UPT	Rp 109.971.786.000	Rp 120.121.535.656			
276	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 110.576.719.000	607.932.500	577.535.875
277	Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	Tercapainya target PAD UPT	Rp 180.780.705.000	Rp 194.960.254.547			
277	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 179.521.776.000	696.105.000	661.299.750
278	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	Tercapainya target PAD UPT	Rp 199.539.250.000	Rp 218.957.282.210			
278	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 109.311.255.000	513.256.000	487.593.200
279	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Tercapainya target PAD UPT	Rp 140.300.000.000	Rp 150.364.043.937			
279	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 138.507.406.000	548.617.000	521.186.150
280	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	Tercapainya target PAD UPT	Rp 48.595.261.000	Rp 51.993.426.386			
280	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 47.735.755.000	523.140.000	496.983.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) (*)
281	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	Tercapainya target PAD UPT	Rp 366.353.207.000	Rp 396.681.272.089			
281	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 366.479.730.000	843.129.000	800.972.550
282	Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Tercapainya target PAD UPT	Rp 238.805.792.000	Rp 252.677.609.448			
282	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 234.850.517.000	505.394.000	480.124.300
283	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Tercapainya target PAD UPT	Rp 92.634.529.000	Rp 97.900.076.250			
283	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 90.309.464.000	527.622.250	501.241.137
284	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Tercapainya target PAD UPT	Rp 154.543.114.000	Rp 167.578.435.527			
284	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 155.063.632.000	516.933.000	491.086.350
285	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Tercapainya target PAD UPT	Rp 370.790.770.000	Rp 404.135.066.691			
285	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 372.874.982.000	563.742.000	535.554.900
286	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Tercapainya target PAD UPT	Rp 226.943.953.000	Rp 250.297.085.920			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) (*)
286	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 231.985.800.000	728.733.540	692.296.863
287	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Tercapainya target PAD UPT	Rp 235.483.000.000	Rp 259.561.303.939			
287	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 239.611.042.000	588.021.000	558.619.950
288	Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar	Tercapainya target PAD UPT	Rp 260.692.256.000	Rp 194.960.254.547			
288	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Blitar	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 259.664.079.000	565.681.250	538.347.187
289	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Tercapainya target PAD UPT	Rp 165.075.500.000	Rp 185.031.777.793			
289	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 167.750.796.000	635.491.000	603.716.450
290	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang	Tercapainya target PAD UPT	Rp 129.313.386.813	Rp 129.313.386.813			
290	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 117.861.608.000	587.128.000	557.771.600
291	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan	Tercapainya target PAD UPT	Rp 272.495.585.000	Rp 296.869.373.289			
291	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD UPT			Rp 277.507.927.000	706.770.000	671.431.500

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
292	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 62.783.450.000</i>	<i>Rp 70.315.236.211</i>			
292	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 64.209.120.000</i>	<i>543.722.000</i>	<i>516.535.900</i>
293	<i>Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 251.897.629.000</i>	<i>Rp 275.261.967.670</i>			
293	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 254.214.778.000</i>	<i>657.435.000</i>	<i>624.563.250</i>
294	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 57.724.500.000</i>	<i>Rp 64.940.286.126</i>			
294	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 58.300.156.000</i>	<i>457.791.500</i>	<i>434.901.925</i>
295	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 276.847.000.000</i>	<i>Rp 304.232.712.146</i>			
295	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 278.746.564.000</i>	<i>727.009.100</i>	<i>690.658.645</i>
296	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 72.094.862.000</i>	<i>Rp 81.201.089.591</i>			
296	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Pamekasan</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 73.389.586.000</i>	<i>417.635.000</i>	<i>396.753.250</i>
297	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 69.939.300.000</i>	<i>Rp 79.702.344.477</i>			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)		Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2017)	Anggaran Kegiatan dan Realisasi Tahun Berjalan (2017)	
			Target (Output) Tahun 2016	Realisasi (Output) Tahun 2016		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) *)
297	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 72.756.347.000</i>	<i>492.491.000</i>	<i>467.866.450</i>
298	<i>Peningkatan Pelayanan Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 42.585.500.000</i>	<i>Rp 47.259.573.222</i>			
298	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 42.951.067.000</i>	<i>445.008.000</i>	<i>422.757.600</i>
299	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep</i>	<i>Tercapainya target PAD UPT</i>	<i>Rp 63.299.719.000</i>	<i>Rp 72.800.611.315</i>			
299	<i>Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep</i>	<i>Jumlah Penerimaan PAD UPT</i>			<i>Rp 65.867.620.000</i>	<i>544.185.000</i>	<i>516.975.750</i>

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dinilai dari seberapa besar deviasi realisasi kinerja program/kegiatan terhadap target kinerja program/kegiatan yang telah ditentukan, serta menilai rasio/prosentase kinerja realisasi belanja program/kegiatan terhadap target belanja atau pagu anggaran yang telah ditetapkan. Uraian seperti tertera pada **Tabel 2.1** di atas, bahwa (dari kelima Program yang telah diimplementasikan) untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rasio capaiannya sebesar 91,73%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 90,89%, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah rasio capaiannya 72,44%, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan rasio capaiannya 78,68% dan yang terakhir adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 93,64%. Sehingga rata-rata rasio capaian belanja langsung program/kegiatan selama Tahun Anggaran 2016 adalah 90,20%.

Sedangkan untuk **perkiraan realisasi belanja program/kegiatan pada Tahun 2017 (Tahun Berjalan)**, diperkirakan sebagai berikut : untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah perkiraan rasio capaiannya sebesar **98,00%**, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio capaiannya sebesar **95,00%**, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkiraan rasio capaiannya sebesar **95,00%**, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah rasio capaiannya **95,00%** dan yang terakhir adalah Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan perkiraan rasio capaian sebesar **95,00%**.

Terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dengan menggunakan referensi capaian awal atau tahun dasar perencanaan yang digunakan adalah akhir tahun 2013. Berikut adalah uraian Realisasi Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2016 pada Tabel dibawah.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	32.71%	26.30%	60.53%	74.97%	89.41%	32.29%	35.21%				105.94%	133.88%			
2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) PKB	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	45.56%	78.94%				113.90%	175.42%			
3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.50	88.00	88.50	89.00	89.50	88.99	86.30				101.70%	98.07%			
4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan SMM ISO 9001-2008	1	1	1	1	1	2	3				200.00%	300.00%			
5. Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	51.93%	53.89%				207.71%	179.63%			

Dari tabel diatas diketahui bahwa kelima target indikator kinerja pada tahun 2016 berhasil dicapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian target dijelaskan per indikator kinerja sebagaimana berikut:

- Untuk indikator kinerja pertama yaitu tingkat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun lalu (tahun 2013) sebesar Rp 9.464.416.237.214,00. dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 12.797.234.879.918,00, dimana diperoleh tingkat kenaikan sebesar 35,21%, lebih besar 8,91% dari target yang ditetapkan sebesar 26,30%, sehingga tingkat kemajuannya adalah 133,88%. Target indikator pertama tersebut dapat terlampaui karena total seluruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melampaui target yang telah ditetapkan.

- Untuk indikator kinerja kedua yaitu persentase penurunan piutang pajak kendaraan bermotor, sepanjang tahun 2016, jumlah piutang yang berhasil ditagih adalah sebesar Rp 219.611.343.097 sehingga sisa piutang tahun tetap tahun 2013 adalah sebesar Rp 237.445.297.005 atau 78,94 %. Tingkat Kemajuan dari indikator kedua adalah 175,42%, kinerja pencairan tunggakan/piutang pajak kendaraan bermotor didukung melalui dinas luar pencairan tunggakan, sosialisasi kepada masyarakat maupun operasi bersama yang melibatkan pihak-pihak yang terkait.
- Untuk indikator kinerja ketiga yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2016, diperoleh rata-rata nilai IKM pada 46 Kantor Bersama Samsat sebesar 87,28 lebih rendah 0,72 dari target 88,00 sehingga tingkat kemajuannya adalah 98,07%. Tidak tercapainya target kinerja skor indeks kepuasan masyarakat disebabkan karena adanya perubahan metode penghitungannya yang berpengaruh pada batasan perolehan skor maksimal.
- Untuk indikator kinerja keempat yaitu jumlah ruang lingkup/jenis pelayanan yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 pada tahun 2016 telah diperoleh penambahan dua ruang lingkup layanan yang telah menerapkan standar manajemen mutu tersebut yaitu pelaksanaan e-samsat dan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- Untuk indikator kinerja kelima yaitu jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan samsat unggulan, pada tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan unggulan adalah sebanyak 6.035.819 pada 141 samsat unggulan yang ada di Jawa Timur. Apabila diprosentase sebanyak 53,89% Wajib Pajak memanfaatkan layanan unggulan, lebih besar 23,89% dari target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat kemajuannya adalah sebesar 179,63%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak pemanfaat layanan unggulan adalah dengan terus memberikan penambahan jenis maupun jumlah layanan unggulan agar semakin dekat kepada wajib pajak.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam Aspek Daya Saing Daerah, Fokus Iklim Berinvestasi khususnya Pengenaan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Daerah di Jawa Timur berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut bersifat *closed list* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 5 jenis Pajak Daerah, yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Adapun jenis pungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah Retribusi Jasa Usaha, yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- b. Retribusi Tempat Pelelangan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menjelang akhir tahun 2016 proses penataan perangkat daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dapat dirampungkan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah tersebut kemudian diimplementasikan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Rangkaian penataan perangkat daerah tersebut, menuntut perubahan lebih lanjut pada beberapa dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya adalah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, untuk mengakomodir perubahan nomenklatur baru, sekaligus penyesuaian indikator kinerja perangkat daerah, serta penataan/distribusi Program/Kegiatan bagi masing-masing Bidang dan Sub Bidang pada struktur organisasi perangkat daerah yang baru.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2016, pengelolaan Pendapatan Daerah mendapatkan tantangan cukup besar akibat gejolak ekonomi global yang berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional yang belum stabil dan fokus anggaran Pemerintah lebih mengutamakan penyediaan infrastruktur, sedangkan penerimaan Pajak Pusat tidak mencukupi (sampai dengan dengan 31 Desember 2016 hanya mencapai 81,54%), kondisi ini akhirnya disikapi Pemerintah dengan mengambil kebijakan untuk melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum selama empat bulan kepada Pemerintah Daerah. Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut ditambah dengan kondisi pasar yang cenderung lesu, menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan

efisiensi dan mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi dari penerimaan sektor Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atau diselenggarakan bersama dengan pihak swasta/bumn.

Sedangkan upaya Ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan sektor Retribusi Daerah dan sektor Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, beberapa upaya yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini antara lain: pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak perbankan dalam rangka untuk memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pemasangan lokasi ATM /space promosi.

Untuk dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, maka berikut adalah arah Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta simulasi potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
2. Mengoptimalkan pencairan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis *accrual*;
3. Membuka kesempatan secara luas kepada pihak BUMN/Swasta untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

5. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Unggulan.
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur, dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam mendukung Penerimaan PAD,
3. Melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pos,
4. Pemanfaatan kegiatan penagihan dan pembayaran Pajak Daerah melalui optimalisasi penagihan door to door yang didukung dengan pelayanan Samsat Keliling di seluruh Jawa Timur,

2.3.1 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan konsep pengakuan Piutang Pajak Daerah, berdasarkan Surat Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa hak atas piutang PKB timbul setelah dilakukan penetapan melalui proses registrasi identifikasi. Perubahan konsep pengakuan piutang tersebut berdampak pada upaya penagihan piutang pajak yang tidak optimal sejak bulan November 2016, kedepan diperlukan strategi dan upaya baru untuk melakukan upaya penagihan;

2. Kondisi perekonomian nasional yang belum membaik, berpengaruh pada daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru, sehingga berdampak pada Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset;
5. Prioritas pengeluaran rumah tangga Wajib Pajak, lebih mengedepankan pemenuhan konsumsi rumah tangga akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
6. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang optimal, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya objek dan wajib pajak.
7. Semakin tingginya biaya operasional untuk mendukung pelayanan

2.3.2 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

***Strength* (Kekuatan)**

Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan Daerah yang tersebar di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

3. Adanya Samsat *Drive Thru*, Layanan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;
4. Adanya Samsat *Link*, penunjang layanan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Adanya Samsat Keliling, layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Adanya Samsat *Payment Point*, layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;
7. Adanya Samsat *Corner*, layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada *Plaza/Mall*;
8. Dukungan layanan non tunai melalui *internet banking, mobile banking* maupun ATM untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
9. Adanya Anjungan Tunai Mandiri Samsat (ATM Samsat Jatim) sebagai layanan baru untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus melakukan pengesahan STNK Tahunan dalam satu mesin yang sama.
10. Layanan pencetakan Bukti Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK melalui mesin embosser, sebagai pelengkap layanan e-Samsat.
11. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di 850 kantor pos di Jawa Timur.

Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya;
2. Belum optimalnya distribusi penempatan petugas pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara merata;
3. Komposisi golongan ruang dan Jabatan Pelaksana/Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Jumlah titik operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan.

Opportunity (Peluang)

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pembelian Kendaraan Bermotor Baru;
2. Dukungan regulasi dan komitmen dari para pihak terkait pengembangan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik;
3. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya pengembangan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien.

Threat (Ancaman)

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dan harga Bahan Bakar Minyak berakibat pada belum membaiknya kondisi ekonomi makro, sehingga

- berpengaruh kepada daya beli masyarakat dan juga berdampak kepada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. Rekomendasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, berdampak pada potensi kehilangan pendapatan dari denda/sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor;
 3. Mekanisme pembentukan harga jual Bahan Bakar Minyak secara bebas mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, berdampak pada fluktuasi penerimaan Pajak Kendaraan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Proses registrasi dan identifikasi sebagian besar masih menggunakan metode verifikasi pada dokumen *hard copy*, sehingga pelaksanaannya memakan waktu cukup lama;
 5. Kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait dengan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor akan berpotensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, akibat jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak semakin besar..

2.3.3 FORMULASI ISU-ISU PENTING

Beberapa isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2018 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi beberapa Tuntutan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung program konektivitas regional dan nasional;
 - b. Pengembangan Program Pemberdayaan UMKM Provinsi Jawa Timur;
 - c. Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan masyarakat Jawa Timur;
 - d. Pengembangan Program Pendidikan;
 - e. Pemenuhan terhadap Peningkatan Kebutuhan Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

2. Kebijakan belanja *money follow* program sehingga belanja program/kegiatan diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung agenda/prioritas nasional maupun regional;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
4. Tuntutan terhadap Pemenuhan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain yang memiliki Potensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan Daerah baru, sehingga mengurangi ketergantungan Pendanaan yang berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara "*Limitative/ Closed List*" oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah yang berasal dari Dana Transfer yaitu Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPH 25/ 29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok, serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), sehingga terhadap Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,

2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat *Payment Point*, Samsat Kepulauan, Samsat Kepulauan, e-Samsat dan ATM Samsat, dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik untuk memberitahukan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir,
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc,
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun,
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan,
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu inovasi-inovasi pelayanan publik dan pemberian kemudahan-kemudahan persyaratan bagi pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya kedepan adalah pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian Samsat *Payment Point* yang bekerja sama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya

tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Selain itu juga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain:

- *Homepage* yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>

Layanan melalui *website*, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berbagai *type* dan tahun pembuatan,

- *e-Samsat* Jatim atau *e-Banking* merupakan pelayanan 24 Jam secara *online* di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI,

- *SMS Info* PKB

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS,

- *SMS* Komplain

Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- *ATM Samsat* Jatim

Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan sekaligus Pengesahan STNK dengan metode *self service* yang ditempatkan pada beberapa lokasi strategis.

- *Mesin Embosser* Elektronik

Layanan pencetakan bukti bayar pajak dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, sebagai pendukung layanan *e-Samsat* dan *Samsat Pos* .

Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber Pajak Daerah, melalui perluasan basis objek pajak sesuai dengan Undang-Undang yang selama ini belum dapat secara optimal, serta mengoptimalkan pengenaan pajak progresif bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor R4 lebih dari satu;
2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang sah, melalui penambahan objek maupun pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah yang belum optimal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;
4. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;
5. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Mengembangkan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini;
7. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
8. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan target kinerja dan program/kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis yang telah dicanangkan pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, dimana tahun 2018 merupakan perencanaan tahun keempat dari rencana lima tahunan yang telah ditetapkan. Selain mengacu kepada dokumen perencanaan strategis tersebut, rencana kerja tahun 2018 juga berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, utamanya untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan misi ke empat yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta profesionalisme pelayanan publik. Untuk dapat mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Timur melalui pelaksanaan misi keempat tersebut, maka diperlukan sinkronisasi agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan agenda prioritas yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan melakukan telaah hasil rekomendasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atas lampiran matriks RKPD tahun 2018, dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan riil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan tolok ukur pada Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan misi ke empat dengan tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik”. Sasaran dari misi keempat tersebut adalah “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan/capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator sasaran “Jumlah Pendapatan Asli Daerah” dimana tanggungjawab pencapaian indikator sasaran tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi, melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan:

Penetapan rumusan **Tujuan** Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sesuai dengan rumusan Tujuan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik**, dengan rumusan **Sasaran Pertama** sebagai berikut: **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, dan **Indikator Sasarannya** adalah **Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**. Selanjutnya rumusan **Sasaran Kedua**, sebagai berikut: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, dan **Indikator Sasarannya** adalah:

- a. **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;**
- b. **Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);**
- c. **Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;**

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan pada dokumen perencanaan tahunan. Yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke
			2018
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik	Meningkatnya PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2,01%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke
			2018
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86.00%
		Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52%

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Beberapa perubahan mendasar akibat penataan Perangkat Daerah adalah adanya penambahan Program spesifik bagi pelaksana kebijakan perangkat daerah sehingga pada Rencana Kerja tahun 2018, masing-masing pejabat administrator akan dibekali oleh satu program yang *outcome* nya akan mendukung pencapaian Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Program yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) Program yang

akan dilaksanakan oleh setiap Bidang/Sekretaris/Unit Pelaksana Teknis pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Secara keseluruhan alokasi usulan anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 210.000.000.000,00 terdiri atas:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor		100%	51.765.940.863	APBD		100%	56.837.381.846
019	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran</i>	<i>Surabaya</i>	<i>100%</i>	<i>51.765.940.863</i>	<i>APBD</i>		<i>100%</i>	<i>56.837.381.846</i>
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		100%	50.210.835.199	APBD		100%	55.129.924.531
012	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur</i>	<i>Surabaya</i>	<i>50 paket</i>	<i>27.151.136.251</i>	<i>APBD</i>		<i>50 paket</i>	<i>29.811.097.276</i>
031	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Surabaya</i>	<i>96 paket</i>	<i>23.059.698.948</i>	<i>APBD</i>		<i>96 paket</i>	<i>25.318.827.255</i>
07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi		100%	26.312.753.451	APBD		100%	28.890.579.218

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
001	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan</i>	Surabaya	90 kali	6.312.753.109	APBD		90 kali	6.931.205.209
002	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal</i>	Surabaya	50 pegawai	20.000.000.342	APBD		50 pegawai	21.959.374.009
		<i>Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM</i>		500 pegawai				500 pegawai	
08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		100%	1.466.943.114	APBD		100%	1.697.506.781
001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun</i>	Surabaya	7 dokumen	500.006.705	APBD		8 dokumen	617.887.415
002	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	<i>Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun</i>	Surabaya	6 dokumen	430.603.849	APBD		6 dokumen	543.286.806
003	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	<i>Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir</i>	Surabaya	1 sistem	286.332.560			1 sistem	286.332.560

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
004	<i>Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan</i>	<i>Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun</i>	Surabaya	13 dokumen	250.000.000			13 dokumen	250.000.000
051	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Rencana Target Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)		12.425	3.774.737.686	APBD		12.656	4.144.543.761
001	<i>Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD</i>	Surabaya	2 dokumen	75.000.000	APBD		2 dokumen	75.000.000
002	<i>Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD</i>	Surabaya	2 dokumen	75.000.000	APBD		2 dokumen	75.000.000
003	<i>Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi</i>	Surabaya	12 dokumen	852.400.000	APBD		12 dokumen	900.00.000
004	<i>Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah Software Pendukung Layanan</i>	Surabaya	2 paket	2.772.337.686	APBD		2 paket	3.094.543.761
053	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Milyar Rupiah)		12.403	7.082.213.744	APBD		12.633	7.776.048.888

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
001	<i>Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB</i>	<i>Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB & BBNKB</i>	Surabaya	8 dokumen	4.249.328.246	APBD		8 dokumen	4.665.629.333
002	<i>Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya</i>	<i>Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB & BBNKB</i>	Surabaya	7 dokumen	2.832.885.498	APBD		7 dokumen	3.110.419.555
053	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan (Milyar Rupiah)		22,7	3.005.742.870	APBD		23,9	3.639.939.194
001	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan</i>	Surabaya	2 dokumen	1.052.779.304	APBD		2 dokumen	1.274.910.337
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penggalan Potensi Objek Retribusi Daerah</i>		2 dokumen				2 dokumen	
002	<i>Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak</i>	Surabaya	2 dokumen	1.142.181.330	APBD		2 dokumen	1.383.175.731

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
003	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21	Surabaya	1 dokumen	270.000.080	APBD		1 dokumen	326.968.709
004	Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah laporan kegiatan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Surabaya	62 dokumen	540.782.156	APBD		62 dokumen	654.884.417
054	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Layanan yang Bersertifikat		91%	4.238.943.037	APBD		92%	4.654.226.698
001	Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	Jumlah Dokumen Sertifikasi	Surabaya	3 dokumen /sertifikat	1.311.717.012	APBD		3 dokumen /sertifikat	1.440.224.198
002	Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi	Surabaya	3 dokumen	2.927.226.025			3 dokumen	3.214.002.500
055	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penurunan Temuan SPI		7,5%	3.832.274.255	APBD		5%	4.207.717.111
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan		100%				100%	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
001	<i>Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>	Surabaya	2 dokumen	374.999.927	APBD		2 dokumen	411.738.176
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Kinerja</i>		70 dokumen				70 dokumen	
002	<i>Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Pendapatan Daerah</i>	Surabaya	70 dokumen	1.728.637.165	APBD		70 dokumen	1.897.989.468
004	<i>Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian (LHP) Administrasi</i>	Surabaya	70 dokumen	1.728.637.163	APBD		70 dokumen	1.897.989.467
056	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Jawa Timur (jam/tahun)		38	2.792.090.045	APBD		36	3.065.627.426
001	<i>Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi</i>	Surabaya	2 dokumen	60.001.935	APBD		2 dokumen	65.880.246
002	<i>Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi</i>	Surabaya	4 dokumen	200.006.450	APBD		70 dokumen	219.600.818

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pemeliharaan jaringan	Surabaya	18 paket	2.532.081.660	APBD		18 paket	2.780.146.362
		Jumlah pengadaan sarana pendukung		2 paket				2 paket	
057	Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur (Milyar Rp)		2.497,8	55.517.525.736	APBD		2.544	60.956.504.546
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan (Milyar Rupiah)		2.501,9				2.544	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat (Milyar Rupiah)		566,5				577,1	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara (Milyar Rupiah)		576,6				587,3	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto (Milyar Rupiah)		281,5				286,7	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo (Milyar Rupiah)		811,8				826,9	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik (Milyar Rupiah)		351,7				358,2	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang (Milyar Rupiah)		208,0				211,8	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro (Milyar Rupiah)		171,9				175,1	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban (Milyar Rupiah)		177,5				180,8	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan (Milyar Rupiah)		189,6				193,1	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi (Milyar Rupiah)		112,7				114,8	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun (Milyar Rupiah)		183,1				186,5	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan (Milyar Rupiah)		111,5				113,6	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo (Milyar Rupiah)		141,2				143,9	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan (Milyar Rupiah)		48,6				49,5	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri (Milyar Rupiah)		373,8				380,7	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung (Milyar Rupiah)		239,5				244	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek (Milyar Rupiah)		92,1				93,8	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk (Milyar Rupiah)		158,1				161,1	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota (Milyar Rupiah)		380,3				387,4	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan (Milyar Rupiah)		236,6				241	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota (Milyar Rupiah)		244,4				248,9	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar (Milyar Rupiah)		264,8				269,8	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo (Milyar Rupiah)		171,1				174,3	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang (Milyar Rupiah)		120,2				122,4	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan (Milyar Rupiah)		283,0				288,3	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo (Milyar Rupiah)		65,4				66,7	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember (Milyar Rupiah)		259,3				264,1	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso (Milyar Rupiah)		59,4				60,5	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi (Milyar Rupiah)		284,3				289,6	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan (Milyar Rupiah)		74,8				76,2	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan (Milyar Rupiah)		74,2				75,5	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang (Milyar Rupiah)		43,8				44,6	
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep (Milyar Rupiah)		67,1				68,4	
001	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Surabaya	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Surabaya	1 sertifikat				1 sertifikat	
002	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Surabaya	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
003	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Surabaya	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
004	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Surabaya	96dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
005	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Surabaya	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Surabaya	1 sertifikat				1 sertifikat	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
006	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Surabaya	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
007	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Surabaya	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
008	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Surabaya	96dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
009	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Surabaya	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Surabaya	1 sertifikat				1 sertifikat	
010	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Surabaya	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
011	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Surabaya	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
012	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Surabaya	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
013	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Surabaya	7 layanan	1.310.600.482	APBD		7 layanan	1.441.734.213

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Surabaya	1 sertifikat				1 sertifikat	
014	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Surabaya	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
015	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Surabaya	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Surabaya	2 dokumen				2 dokumen	
016	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Surabaya	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
017	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Mojokerto	8 layanan	1.310.600.482	APBD		8 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Mojokerto	1 sertifikat				1 sertifikat	
018	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Mojokerto	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
019	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Mojokerto	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Mojokerto	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
020	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Mojokerto	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
021	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Sidoarjo	11 layanan	1.876.879.244	APBD		6 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Sidoarjo	2 sertifikat				1 sertifikat	
022	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Sidoarjo	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
023	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Sidoarjo	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sidoarjo	4 dokumen				4 dokumen	
024	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Sidoarjo	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
025	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Gresik	9 layanan	1.310.600.482	APBD		9 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Gresik	1 sertifikat				1 sertifikat	
026	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Gresik	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
027	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Gresik	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Gresik	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
028	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Gresik	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
029	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Jombang	8 layanan	1.310.600.482	APBD		8 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Jombang	1 sertifikat				1 sertifikat	
030	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Jombang	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
031	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jombang	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jombang	2 dokumen				2 dokumen	
032	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Jombang	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
033	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Bojonegoro	10 layanan	1.310.600.482	APBD		10 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Bojonegoro	1 sertifikat				1 sertifikat	
034	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Bojonegoro	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
035	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Bojonegoro	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bojonegoro	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
036	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Bojonegoro	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
037	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Tuban	7 layanan	1.310.600.482	APBD		7layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Tuban	1 sertifikat				1 sertifikat	
038	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Tuban	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
039	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Tuban	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Tuban	2 dokumen				2 dokumen	
040	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Tuban	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
041	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Lamongan	8 layanan	1.310.600.482	APBD		8 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Lamongan	1 sertifikat				1 sertifikat	
042	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Lamongan	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
043	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Lamongan	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Lamongan	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
044	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Lamongan	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
045	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Ngawi	6 layanan	1.876.879.244	APBD		6 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Ngawi	2 sertifikat				2 sertifikat	
046	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Ngawi	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
047	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Ngawi	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ngawi	4 dokumen				4 dokumen	
048	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Ngawi	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
049	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Madiun	8 layanan	1.876.879.244	APBD		8 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Madiun	2 sertifikat				2 sertifikat	
050	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Madiun	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
051	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Madiun	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Madiun	4 dokumen				4 dokumen	50.000.000
052	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Madiun	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
053	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Magetan	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Magetan	1 sertifikat				1 sertifikat	
054	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Magetan	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
055	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Magetan	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Magetan	2 dokumen				2 dokumen	
056	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Magetan	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
057	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Ponorogo	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Ponorogo	1 sertifikat				1 sertifikat	
058	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Ponorogo	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
059	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Ponorogo	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ponorogo	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
060	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Ponorogo	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
061	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Pacitan	4 layanan	1.310.600.482	APBD		4 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Pacitan	1 sertifikat				1 sertifikat	
062	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Pacitan	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
063	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Pacitan	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Pacitan	2 dokumen				2 dokumen	
064	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Pacitan	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
065	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Kediri	11 layanan	1.876.879.244	APBD		10 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Kediri	1 sertifikat				1 sertifikat	
066	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Kediri	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
067	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Kediri	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kediri	6 dokumen				6 dokumen	50.000.000
068	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Kediri	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
069	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Tulungagung	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Tulungagung	1 sertifikat				1 sertifikat	
070	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Tulungagung	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
071	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Tulungagung	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Tulungagung	2 dokumen				2 dokumen	
072	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Tulungagung	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
073	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Trenggalek	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Trenggalek	1 sertifikat				1 sertifikat	
074	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Trenggalek	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
075	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Trenggalek	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Trenggalek	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
076	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Trenggalek	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
077	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nganjuk	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Nganjuk	1 sertifikat				1 sertifikat	
078	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Nganjuk	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
079	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Nganjuk	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nganjuk	2 dokumen				2 dokumen	
080	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Nganjuk	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
081	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Malang Kota	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Malang Kota	1 sertifikat				1 sertifikat	
082	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Malang Kota	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
083	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Malang Kota	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Malang Kota	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
084	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Malang Kota	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
085	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Malang Kab	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Malang Kab	1 sertifikat				1 sertifikat	
086	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Malang Kab	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
087	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Malang Kab	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Malang Kab	2 dokumen				2 dokumen	
088	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Malang Kab	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
089	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara & Batu Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Malang Kab Kota Batu	7 layanan	1.876.879.244	APBD		7 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Malang Kab Kota Batu	1 sertifikat				1 sertifikat	
090	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara & Batu Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Malang Kab Kota Batu	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
091	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara & Batu Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Malang Kab Kota Batu	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Malang Kab Kota Batu	4 dokumen				4 dokumen	50.000.000
092	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara & Batu Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Malang Kab Kota Batu	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
093	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Blitar Kab dan Kota	7 layanan	1.876.879.244	APBD		7 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Blitar Kab dan Kota	2 sertifikat				2 sertifikat	
094	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Blitar Kab dan Kota	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
095	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Blitar Kab dan Kota	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Blitar Kab dan Kota	4 dokumen				4 dokumen	
096	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Blitar Kab dan Kota	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
097	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Probolinggo Kab dan Kota	7 layanan	1.876.879.244	APBD		7 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Probolinggo Kab dan Kota	2 sertifikat				2 sertifikat	
098	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Probolinggo Kab dan Kota	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
099	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Probolinggo Kab dan Kota	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Probolinggo Kab dan Kota	4 dokumen				4 dokumen	50.000.000
100	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Probolinggo Kab dan Kota	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
101	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Lumajang	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Lumajang	1 sertifikat				1 sertifikat	
102	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Lumajang	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
103	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Lumajang	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Lumajang	2 dokumen				2 dokumen	
104	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Lumajang	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
105	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Pasuruan Kab dan Kota	8 layanan	1.876.879.244	APBD		8 layanan	2.063.490.559
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Pasuruan Kab dan Kota	1 sertifikat				1 sertifikat	
106	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Pasuruan Kab dan Kota	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
107	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Pasuruan Kab dan Kota	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Pasuruan Kab dan Kota	2 dokumen				2 dokumen	50.000.000
108	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Pasuruan Kab dan Kota	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
109	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Situbondo	4 layanan	1.310.600.482	APBD		4 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Situbondo	1 sertifikat				1 sertifikat	
110	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Situbondo	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
111	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Situbondo	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Situbondo	2 dokumen				2 dokumen	
112	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Situbondo	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
113	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Jember	8 layanan	1.310.600.482	APBD		8 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Jember	2 sertifikat				2 sertifikat	
114	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Jember	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
115	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jember	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jember	4 dokumen				4 dokumen	50.000.000
116	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Jember	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
117	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Bondowoso	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Bondowoso	1 sertifikat				1 sertifikat	
118	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Bondowoso	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
119	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Bondowoso	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bondowoso	2 dokumen				2 dokumen	
120	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Bondowoso	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
121	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Banyuwangi	9 layanan	1.876.879.244	APBD		9 layanan	2.063.490.59
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Ponorogo	2 sertifikat				2 sertifikat	
122	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Ponorogo	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
123	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Ponorogo	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ponorogo	4 dokumen				4 dokumen	50.000.000
124	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Ponorogo	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
125	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Pamekasan	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Pamekasan	1 sertifikat				1 sertifikat	
126	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Pamekasan	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
127	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Pamekasan	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Pamekasan	2 dokumen				2 dokumen	
128	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Pamekasan	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
129	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Bangkalan	6 layanan	1.310.600.482	APBD		6 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Bangkalan	1 sertifikat				1 sertifikat	
130	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Bangkalan	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
131	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Bangkalan	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bangkalan	6 dokumen				6 dokumen	50.000.000
132	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Bangkalan	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
133	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Sampang	3 layanan	1.310.600.482	APBD		3 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Sampang	1 sertifikat				1 sertifikat	
134	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Sampang	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
135	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Sampang	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sampang	2 dokumen				2 dokumen	
136	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Sampang	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000
137	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Sumenep	5 layanan	1.310.600.482	APBD		5 layanan	1.441.734.213
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan	Sumenep	1 sertifikat				1 sertifikat	
138	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah	Sumenep	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 dokumen	50.000.000
139	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Sumenep	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sumenep	6 dokumen				6 dokumen	50.000.000
140	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama	Sumenep	96 dokumen	40.000.000	APBD		96 dokumen	40.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018. Dokumen Renja-PD juga dapat digunakan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini, diharapkan bahwa perencanaan perangkat daerah telah dilaksanakan secara, terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi baik dilingkup internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Program dan Kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018.

Surabaya,

Juni 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001

